



SINKRONISASI PERATURAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS DAN CALON PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Oleh

Talitha Ulimaz Islamey¹ dan Sutanto²

INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya ketidak sinkronan antara magang Calon Notaris dan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah dan mengetahui dan menganalisis prospek sinkronisasi yang dapat dilakukan sehubungan dengan adanya perbandingan waktu magang antara Calon Notaris dan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Jenis penelitian ini dilakukan dengan dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh fakta di lapangan guna memperoleh data primer. Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknis pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode ini ditentukan dengan kriteria responden dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dengan obyek penelitian, kemudian menggunakan beberapa narasumber yang memberikan informasi sesuai dengan pengetahuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak sinkronan antara magang Calon Notaris dan Calon PPAT karena terdapat dua badan pemerintahan yang berbeda kepentingan. Notaris diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang PPAT merupakan perpanjangan pelaksanaan tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimana masing-masing dari Kementerian tersebut memiliki kepentingan yang berbeda yang tidak bisa disamakan atau diselaraskan. Prospek sinkronisasi yang dapat dilakukan sehubungan dengan adanya perbandingan waktu magang antara Calon Notaris dan Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: 1. Dilaksanakan sesuai kebijakan masing-masing Kantor Notaris yang sekaligus menjabat sebagai PPAT dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan menyatukan 2 (dua) instansi yang berbeda yaitu Notaris dan PPAT kedalam satu badan yang sama.

Kata Kunci : Peraturan Magang, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

¹ Pramuka 13 No.26 RT 004, Samarinda, Kalimantan Timur

² Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



**THE SYNCHRONIZATION OF TRADE REGULATION FOR
PUBLIC NOTARY CANDIDATES AND CANDIDATE OFFICIALS
OF LAND TREATMENT.**

By

Talitha Ulimaz Islamey³ and Sutanto⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the causal factor of non synchronization between apprentice of Notary Candidate and Candidate of Land Deed Officer and to know and analyze the prospect of synchronization which can be done in connection with the comparison of apprenticeship between Notary Candidate and the Candidate of Land Deed Officer.

This type of research uses the type of normative empirical legal research that is legal research that the object of study includes the provisions of legislation (in abstracto) and its application on legal events (in concreto). This type of research is conducted with two types of research, namely library research to obtain secondary data and field research to obtain facts in the field to obtain primary data. Data obtained both primary data and secondary data is processed in a qualitative and then presented descriptively. This research uses technical sampling by using purposive sampling method. This method is determined by the criteria of respondents in this study are those who are directly involved with the object of research, then use some sources that provide information in accordance with his knowledge.

Based on the results of the study, the authors conclude that: Factors that cause the occurrence of synchronization between apprentice Candidate Notary and Candidate PPAT because there are two different government agencies of interest. Notaries are supervised by the Ministry of Law and Human Rights while PPAT is an extension of the implementation of the duties of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / Head of the National Land Agency where each of the Ministries has different interests that can not be equated or aligned. The prospect of synchronization which can be done in connection with the comparison of apprenticeship time between Candidate Notary and Candidate Officer of Deed of Land Deed can be done through 2 (two) ways: 1. Implemented according to the policy of each Notary Office which also serves as PPAT and Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta and unites 2 (two) different agencies namely Notary and PPAT into one same body.

Keywords: Trade regulation, Public Notary, Officials of Land Treatment

³ Pramuka 13 No.26 RT 004, Samarinda, Kalimantan Timur

⁴ Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada